

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***
(Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)



Oleh :
DEPI OKTIA RUSPINA
05344 / 2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode September 2013**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

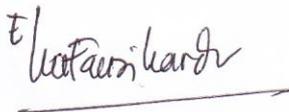
**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)**

Oleh :
Depi Oktia Ruspina
05344 / 2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENEGNDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***
(*Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang*)

Depi Oktia Ruspina

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: dv.ok.ruspina@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine: 1) The effect of the performance of local government officials on the implementation of *good governance*. 2) The effect of financial management on the implementation of *good governance*. 3) The effect of the government's internal control system (SPIP) on the implementation of *good governance*. This study is classified causative research. The population in this study is the Padang local government. The selection of the sample used total sampling methods. Data of this study is primary data. Statistic analysis used multiple regression to test the impact of performance of local government officials, financial management and internal control system of government (SPIP) on the implementation of *good governance*.

The results provided empirical evidences that: 1) Performance of local government officials has positive significant effect on the implementation of *good governnace*. 2) financial management has positive significant effect on the implementation of *good governance*. 3) The system of internal control government (SPIP) has negative significant effect on the implementation of *good governance*.

Future study is suggested: 1) It is recommended to the government employees to improve performance in serving the public, so that people feel satisfied and served with a maximum. 2) It is recommended to perform all indicators of internal control government, so as to positively support the implementation of *good governance*.

KEY WORD : *good governance*, the performance of local government officials, financial management, SPIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*. 2) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. 3) Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *good governance*. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Analisis yang digunakan adalah *regresi berganda* dan uji t untuk melihat pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *good governance*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kecendrungan penerapan *good governnace*. 2) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*. 3) Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan negative terhadap penerapan *good governance*.

Dalam penelitian ini disarankan : 1) Disarankan kepada para pegawai instansi pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan terlayani dengan maksimal. 2) Disarankan untuk melakukan seluruh indikator pengendalian internal pemerintah, sehingga dapat menunjang secara positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

KATA KUNCI : *good governance*, kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, SPIP

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh persiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Salam (2004:19), "Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)".

Mardiasmo (2004:25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsi-prinsip *Good Governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan *Good Governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *Good Governance* didalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang

penerapan kaedah *Good Governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi.

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah menurut Gusmal (Wardani : 2010). Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *Good Governance*. *Good Governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penetapan *Good Governance*, dimana dengan menerapkan diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *Good Governance*. Karakteristik tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif bagi pelaku *Good Governance* menurut Manan (Wardani : 2010).

Kinerja aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah, paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang

ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006:27).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006:30). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut Arens (2008:370) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2)

keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Unsur dari sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (PP No 60 tahun 2008).

Pemerintah yang baik dan bersih dapat diukur dari *performance* aparaturnya. Fakta di lapangan menunjukkan pelayanan birokrasi masih merupakan barang langka dan mahal. Untuk mendapatkan pelayanan, seringkali harus ada biaya tambahan dan ucapan terima kasih yang berlebihan. Terlebih bagi warga masyarakat yang awam dalam urusan administrasi negara. Birokrasi yang demikian tidak hanya menghambat tujuan reformasi tetapi juga telah menjadi sarang korupsi. Efektifitas kinerja aparatur negara di daerah pada umumnya sangat rendah, ini dapat dirasakan dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu, misalnya dalam pembuatan KTP dan surat-surat lainnya. Disini dapat dilihat bahwa aparatur pemerintah daerah yang tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan prinsip dasar *Good Governance*.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny, Pemko Padang berhasil meraih Opini WTP dengan paragraf penjelasan. Artinya, masih ada sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemko Padang, meski cacatan tersebut dinyatakan tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemko Padang tahun 2012. Ditegaskan, catatan dari BPK tersebut harus ditindaklanjuti Pemko Padang dalam waktu

60 hari ke depan. Jika tidak, maka Pemko Padang terancam kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemko Padang untuk segera menyetorkan ke kas daerah sisa dana sertifikasi guru Triwulan I yang terlanjur dibayarkan. Jumlahnya tidak kecil, mencapai Rp2,1 miliar. Catatan lainnya adalah masalah pengelolaan dana bergulir yang belum dilunasi. Pihak BPK mengingatkan agar kewajiban tersebut bisa segera dilunasi. BPK juga mencatat adanya salah penganggaran belanja modal di PU dan catatan tentang adanya pembayaran personal unsur Muspida yang membenani anggaran daerah.(www.harianhaluan.com)

Penelitian ini belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* sejalan dengan penelitian terdahulu Tajuddin (Wardani : 2010) dalam implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah serta faktor organisasi dan manajemen. Penelitian Jaeni (2003) tentang reformasi sistem keuangan daerah untuk menciptakan mekanisme *Good Governance*. Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Walaupun pada saat ini pemerintah telah menerapkan *Good Governance* pada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terdapat dalam tubuh pemerintahan daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*.”**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
3. Sejauhmana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan *Good Governance*.

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis, dapat mengetahui sejauhmana kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintahan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian dapat memberi pengetahuan tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance* dan bahan dalam penelitian selanjutnya tentang lembaga pemerintahan.
3. Bagi instansi yang diteliti, dapat memberikan masukan sehingga penerapan *Good Governance* dapat dilaksanakan agar dapat terwujudnya otonomi daerah yang sesungguhnya.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Governance

Dalam Mardiasmo (2007:17), *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *Good Governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Merujuk pada konsep tersebut, *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama dari *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan politik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku dan budaya kerjanya menurut Indriansyah (Wardani : 2010).

UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi :

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Aturan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan pihak kepolisian yang tidak korupsi.

3) Tansparansi

Tarnsparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholdersnya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk maencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi tersebut bersifat internal atau eksternal.

9) Bervisi Strategi

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* yaitu (K.A. Tajuddin) :

- 1) Faktor manusia pelaksana (*man*)
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *Good Governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local govt*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.
- 2) Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)
Keberhasilan penyelenggaraan *Good Governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat (*public participation*). Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *Good Governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *Good Governance*. Ini berarti bahwa penerapan dan pencapaian *Good Governance* di daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Dalam rangka mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program. Tetapi juga ada keluaran/ manfaat dari program tersebut.

Husnan (1996:241) mengemukakan bahwa kinerja merupakan pengukuran yang dapat dicapai oleh perusahaan yang mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan pada ukuran waktu tertentu. Sedangkan menurut Tugiman (1991:177) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai pada masa lalu dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Menurut Keban (2000:83) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau tingkatan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan/kegiatan program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi.

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menurut Moerdiono (1998) mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari presiden republik.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi (Sedarmayanti, 2004) :

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri kepribadian karyawan dengan hasil (prestasi) kerjanya. Ciri atau karakteristik kepribadian yang dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran, ketaatan,

disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan santun dan lain-lain.

- 2) Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Maksudnya untuk menilai prestasi kerja karyawan melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan.
- 3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan nonfisik.
- 4) Indikator hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
- 5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6) Indikator dampak (*impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2006:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- 1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- 2) Perbaiki dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.
- 3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
- 4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa

yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah

- 5) Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Menurut Ahmad (2004:234) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kpatuhan dan kepatutan.
- 2) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- 3) Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN.
- 4) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Mulyadi (1993:165) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal pemerintah tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dalam PP No 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai berikut :

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Amir (Devfi, 2008) komponen dari sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari :

- 1) Lingkungan pengendalian
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Falsafah manajemen dan gaya operasi
 - d. Struktur organisasi
 - e. Dewan komisaris dan komite audit
 - f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian.
- 2) Penilaian risiko
 - a. Menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji
 - b. Menilai dan bereaksi secara efektif terhadap risiko.
- 3) Aktivitas pengendalian
 - a. Pemisahan kewajiban yang memadai
 - b. Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas
 - c. Dokumen dan catatan yang memadai
 - d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
 - e. Pemeriksaan independen atas pelaksanaan.
- 4) Informasi dan komunikasi
Tujuan informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk memulai, mencatat, pemproses dan melaporkan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait.
- 5) Pemantauan
 - a. Pemantauan dilaksanakan secara periodik
 - b. Menilai kualitas intern.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian relevan ini, penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara kinerja paratur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *Good Governance*, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun salah satunya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin (2008) tentang konsep dan implikasi *Good Governance* di

Kabupaten Bangka, disini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* salah satunya faktor manusia pelaksana dan faktor keuangan daerah yaitu aparatur pemerintah daerah yang kinerjanya dalam melayani masyarakat dan dalam mengelola keuangan daerah masih banyak ditemukan praktik KKN di lingkungan daerahnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Jaeni (2003) tentang reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan mekanisme *Good Governance*, disini ditemukan bahwa hubungan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan *Good Governance* dapat dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Syafrinal (2004) analisis kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disini ditemukan bahwa kinerja pegawai pemerintah Pesisir Selatan pada umumnya pegawai negeri relatif masih belum sesuai dengan harapan. Tingkat pendidikan dan pemberian fasilitas kendaraan kepada pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sekretariat daerah Pesisir Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Objek penelitian adalah seluruh kantor cabang bank pemerintah dan swasta di Kota Padang. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (total sampling).

Kiki Wardani (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance*. Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Solok. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*

dan pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*.

Pengembangan Hipotesis Hubungan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governnace*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa seluruh aparatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, dan masyarakat berhak mengawasi pelayanan ini. Dalam penerapan *Good Governance*, diharapkan aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan prima.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Manan (Wardani, 2010) yang menyatakan bahwa ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *Good Governance* dan muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *Good Governance*. *Good Governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penetapan *Good Governance*, dimana dengan menerapkan *Good Governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsive, dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *Good Governance* karakter tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumberdaya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*.

Menurut Tanjuddin (2008) faktor-kator yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* yaitu :

- 1) Faktor manusia pelaksana (*man*)
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *Good Governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local govt*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.
- 2) Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *Good Governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat (*public participation*). Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *Good Governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggraan pemerintahan.

- 3) Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *Good Governance*. Ini berarti bahwa penerapan dan pemcapaian *Good Governance* di daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut jelas bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah akan mempengaruhi *Good Governance*, karena dengan adanya aparatur pemerintah yang berkualitas dan kompetitif maka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, aparatur pemerintahan daerah dituntut harus memiliki tingkat pendidikan, kedisiplinan dalam penyelesaian tugas, dapat bekerja dalam tim, dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, dan lain sebagainya. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya kinerja aparatur yang baik penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pembangunan.

Tajuddin (2008) tentang konsep dan implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka, disini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* salah satunya faktor manusia pelaksana yaitu aparatur pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan *Good Governance*, diperlukan aparatur pemerintahan yang baik dan handal yakni aparatur yang kondusif, responsif dan adaptif. Karakteristik yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan

kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*. Jadi kuat dugaan kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*.

Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006:27). *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomi, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum reformasi baik menyangkut anggaran maupun akuntansi tidak mendukung mekanisme *Good Governance* bagi entitas pemerintahan yang merupakan cita-cita Indonesia baru yang didengungkan sejak RI memasuki era reformasi.

Menurut Arso (2012) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance* sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi/SKPD dapat terlihat.

Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk menciptakan *Good Governance* dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yaitu masing-masing tahap meliputi input, proses dan output yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD oleh Eksekutif baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada daerah. Tahap pengendalian inputnya berupa laporan pelaksanaan APBD kemudian diproses sebagai dasar evaluasi

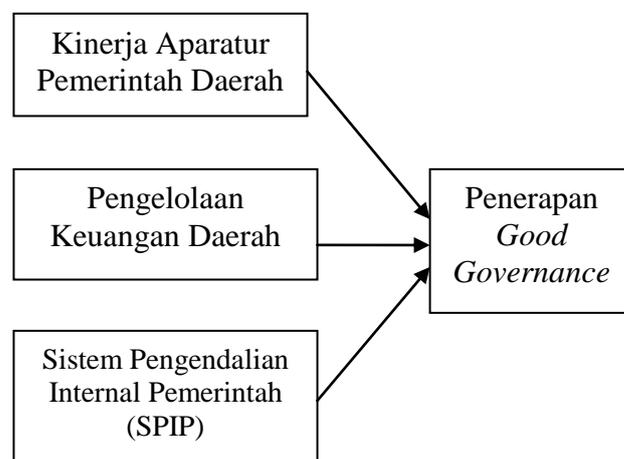
terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban kepala daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi kuat dugaan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapann *Good Governance*.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*

Mulyadi (1993 : 165) mendefinisikan sistem penendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Harus diakui bahwa saat ini *Good Governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kacamata akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *Good Governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Hal itu dialami oleh hampir seluruh pemerintah di Indonesia. Jika sistem pengendalian internal pemerintah tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud.

Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H₁ : Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.
- H₂ : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.
- H₃: Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2005:37). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan kinerja paratur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai variabel independen terhadap penerapan *Good Governance* sebagai variabel dependennya.

Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada Kota Padang. Untuk sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling* dimana seluruh SKPD yang terdapat di Kota Padang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bagian di masing-masing SKPD.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan jenis data dalam penelitian

yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dimana subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan masing-masing SKPD di Kota Padang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan SKPD di Kota Padang dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode survey. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (respon rate) adalah dengan cara mengantar langsung kuesioner tersebut dan juga menghubungi kembali responden melalui telepon guna memastikan bahwa kuesioner yang telah diantar telah diisi oleh responden, setelah itu dikumpulkan kembali dengan menjemputnya langsung.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Governance* (Y).

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja aparatur pemerintah daerah (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai (X3).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Menurut Sugiyono (2008) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban.

Tabel 2
Skala Pengukuran

Skala Likert	Ukuran
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Kuesioner Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Penerapan *Good Governance* diambil berdasarkan teori dan diadopsi dari penelitian terdahulu.

Uji Instrumen Penelitian

Suatu hasil penelitian dapat dikatakan valid dan handal apabila data yang terkumpul menunjukkan keadaan yang sesungguhnya ada atau terjadi pada objek yang diteliti menggunakan instrumen yang handal. Untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya, maka digunakan dua macam pengujian, yaitu:

Uji validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur (valid). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *correlated product moment*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka butir

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya apabila jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* (α). Menurut Nunnally dalam Ghazali (2006:42) jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ maka instrumen dikatakan reliabel.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji regresi berganda, agar menunjukkan hubungan yang valid dan tidak bias maka perlu pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Berikut ini adalah model uji asumsi klasik yang digunakan :

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $\geq 0,05$ maka berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Jika tidak terjadi korelasi dari variabel-variabel bebas maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) ≤ 10 dan *tolerance* $\geq 0,10$.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian dapat

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *partial regression plot (scatter plot)*. Data yang tidak heteroskedastisitas adalah data yang tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

Analisis Deskriptif

- a. Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.
- b. Menghitung nilai jawaban

Model Analisis

Dari data yang dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisis berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan program SPSS. Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$, kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1 , H_2 dan H_3 didasarkan atas :

- 1) Jika tingkat signifikan $\leq (\alpha) = 0,05$ dan memiliki koefisien regresi positif, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis alternatif (H_1, H_2 dan H_3) dengan demikian dapat dikatakan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governance*.
- 2) Jika tingkat signifikan $\geq (\alpha) = 0,05$ dan memiliki koefisien regresi negatif atau jika tingkat signifikan $\leq (\alpha) = 0,05$ dan memiliki koefisien regresi negatif, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1, H_2 dan H_3) ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap Penerapan *Good Governance*.

Uji Model

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis $> \alpha$, maka berarti model tersebut signifikan, sehingga dapat melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat serta untuk menguji apakah model yang digunakan dengan membandingkan nilai sig yang didapat dengan derajat signifikansi $\alpha = 0.05$. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikansi maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan.

Koefisien Determinan (R-square)

Uji determinasi (R^2) adalah untuk mengukur proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen atau ukuran yang menyatakan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

Koefisien Regresi

Analisis data merupakan regresi berganda (*Multiple Regession*) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansinya $< 0,05$, berarti H_a diterima dan H_0

ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansinya $> 0,05$, berarti H_a ditolak dan H_o diterima.

Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu membuat suatu batasan/definisi dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah seperangkat proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai dan bagaimana mengatur orang dengan cara yang tepat untuk meningkatkan tercapainya tujuan visi dan misi pemerintah daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
4. Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai instansi pemerintah daerah Kota Padang. Kuesioner diantar dan dijemput langsung pada responden, adapun lama penyebaran kuesioner sampai pada pengumpulan kembali kuesioner yang disebar adalah dari tanggal Oktober sampai dengan November 2012. Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang. Setiap sampel memiliki dua responden. Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala bagian keuangan di masing-masing SKPD Kota Padang.

Dari jumlah kuesioner yang disebar, kuesioner yang dikembalikan dan kuesioner yang diisi lengkap.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 64$, adalah $0,2075$. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid.

nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen *good governance* diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil $0,216$. Instrumen kinerja aparat pemerintah nilai terkecil $0,276$, instrumen pengendalian keuangan daerah nilai terkecil $0,401$ dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan nilai terkecil sebesar $0,384$.

Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan $1,0$ maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari $0,60$ dianggap buruk, keandalan dalam kisaran $0,7$ bisa diterima, dan lebih dari $0,80$ adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Untuk instrumen *good governance* 0,784, untuk instrumen kinerja aparatur pemerintah 0,777, untuk instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah 0,908, dan untuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah 0.921. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,7. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 16. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

Uji Normalitas residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,077 dengan signifikan 0,475. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor*

(*VIF*) dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai *VIF* yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai *VIF* untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Dari hasil perhitungan, tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Pengujian Model

Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak.

Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa F_{hitung} yaitu 4.437 dengan nilai signifikansi yaitu $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kinerja aparat pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem

pengendalian internal pemerintah) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (*Good Governance*).

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari tampilan *output SPSS model summary*, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,172. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penggunaan teknologi informasi, dan keahlian pemakai adalah sebesar 17.2%, sedangkan 83.8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini menggunakan dua variabel bebas yaitu kinerja aparatur pemerintah (X_1), pengelolaan keuangan daerah (X_2), sistem pengendalian internal pemerintah (X_3) dan satu variabel terikat yaitu *good governance* (Y).

$$Y = 40.608 + 0,612X_1 + 0,457X_2 - 0.362X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 40.608 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kinerja aparat pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah adalah nol maka *good governance* adalah sebesar konstanta 40.608.
- Koefisien kinerja aparat pemerintah sebesar 0,612 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kinerja aparat pemerintah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan *good governance* sebesar 0,612 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.457 bahwa setiap peningkatan satu satuan pengelolaan keuangan daerah, maka akan mengakibatkan peningkatan

good governance sebesar 0,457 dengan asumsi variabel lain konstan.

- Koefisien sistem pengendalian internal pemerintah sebesar -0.362 bahwa setiap peningkatan satu satuan pengelolaan keuangan daerah, maka akan mengakibatkan penurunan *good governance* sebesar 0,362 dengan asumsi variabel lain konstan

Uji Hipotesis (t-test)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 64-2-1 = 61$ adalah 1.99962. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 19, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1.99962. Untuk variabel kinerja aparat pemerintah (X_1) nilai t_{hitung} adalah 2,006 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,006 > 1.99962$ dan nilai signifikansi $0,049 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good governance*. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1.99962. Untuk variabel pengelolaan keuangan daerah (X_2) nilai t_{hitung} adalah 2,681 dan nilai sig adalah 0,009. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,681 > 1.99962$ dan nilai signifikansi $0,009 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

pengelolaan keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good governance*. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1.99962. Untuk variabel pengelolaan keuangan daerah (X2) nilai t_{hitung} adalah -2,322 dan nilai sig adalah 0,023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,322 > 1.99962$ dan nilai signifikansi $0,023 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (X3) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *good governance*. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kinerja aparat pemerintah dengan *good governance*. Hal ini berarti semakin tinggi kinerja aparat pemerintah, maka *good governance* akan tercapai.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2013) tentang Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap *Good Governance* dan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kinerja aparat pemerintah terhadap *good governance*.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu keegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut

mempunyai kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Dalam rangka mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program. Tetapi juga ada keluaran/ manfaat dari program tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2004) mengatakan bahwa kinerja aparatur adalah seperangkat proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai, bagaimana hal ini harus dicapai dan bagaimana mengatur orang dengan cara yang tepat untuk meningkatkan tercapainya tujuan. Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari misi, visi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan.

Kinerja paratur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*. Dimana dengan menerapkan *Good Governance* diperlukan kinerja paratur pemerintah yang baik, kondusif, responsif dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik. Karakteristik ini diharapkan akan diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance*. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka *good governance* pun akan tercapai dengan baik pula.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip *Good Government Governance*, yang

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance*.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk menciptakan *Good Governance* dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yaitu masing-masing tahap meliputi input, proses dan output yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD oleh Eksekutif baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada daerah. Tahap pengendalian inputnya berupa laporan pelaksanaan APBD kemudian diproses sebagai dasar evaluasi terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban kepala daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi kuat dugaan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapann *Good Governance*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan tapi negative antara system pengendalian internal pemerintah dengan *good governance*.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi (2009) tentang Pengaruh SPI, Peran Auditor Internal dan Pengawasan Masyarakat terhadap *Good Governance*.

Mulyadi (1993 : 165) mendefinisikan sistem penendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Harus diakui bahwa saat ini *Good Governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *Good Governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Hal itu dialami oleh hampir seluruh pemerintah di Indonesia. Jika sistem pengendalian internal pemerintah tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud.

Pada penelitian ini SPI malah memberikan pengaruh yang negatif terhadap *good governance*, hal ini kemungkinan disebabkan karena terdapat beberapa indikator SPI yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana dengan baik. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*. Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi lima elemen yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pengendalian internal telah dipenuhi. Elemen pengendalian internal tersebut adalah (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) aktivitas pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan. Sistem pengendalian internal pemerintah dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik. Jika pengendalian intern telah efektif maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Hasil total capaian responden menunjukkan bahwa penilaian terhadap resiko belum dilakukan secara maksimal, hal ini ditandai dengan nilai

capaian terendah yang diperoleh untuk item tersebut. Diperlukan pengoptimalan seluruh indikator pengendalian internal, agar dapat mendukung terbentuknya *good governance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kinerja pemerintah daerah dengan penerapan *good governance* Dimana semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka penerapan *good governance* pun akan semakin baik.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Dimana semakin baik peneglolaan keuangan daerah, maka penerapan *good governance* pun akan semakin baik.
3. Tidak terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dengan penerapan *good governance*.

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dimana selama penyebaran kuesioner, terdapat beberapa SKPD yang tidak bersedia mengisi kuesioner serta terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus cepat tanggap dalam menjelankan setiap keluhan publik atau masyarakat. Pegawai harus memiliki tingkat kreatifitas mencari tata kerja yang baik.
2. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada pemerintah pusat, agar semua karakteristik *good governance* berjalan dengan baik dan optimal untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN pada lingkungan SKPD
3. Sistem pengendalian internal pemerintah sebaiknya menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut sehingga sistem pengendalian internal pemerintah bisa berjalan secara optimal.
4. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*, seperti implementasi *financial audit*, *value for money* audit dan peran auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin .A, Randal J.Elder, dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance pendekatan terintegrasi jilid 1*, Jakarta :Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Devfi, Agustina. 2008. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*. *Skripsi*. UNP. Padang.

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gusmal, 2007. *Lakip Pemerintah Kabupaten Solok 2007*. Solok
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Husen, Umar. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakukaan*. Jakarta : Rajawali Pres
- Jaeni. 2006. Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menciptakan Mekanisme *Good Governance*. Jurnal. Semarang. STIEStikubank.
- Mahsun, Mohammad Dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restruksi dan pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) membangun manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Syafrinal, 2004. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. *Tesis*. Padang. MM UNP.
- Wahyudi, Kurnia. 2009. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor Internal dan Pengawasan dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang. *Skripsi*. UNP. Padang.
- Wardani , Kiki. 2010. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. *Skripsi*. UNP. Padang
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

KUESIONER

A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi daftar pertanyaan berikut :

Nama :

Umur :Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Nama SKPD :

Kuesioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/Ibu/Sdr/I tempuh :

- a. S2
- b. S1
- c. D3
- d. D1
- e. SLTA

2. Bidang keahlian (Pendidikan) Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah ditempuh :

- a. Akuntansi
- b. Manajemen
- c. Teknik
- d. Hukum
- e. Ilmu lainnya (.....)

3. Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr/I bekerja di SKPD ini :

- a. > 5 Tahun
- b. 4 Tahun
- c. 3 Tahun
- d. 2 Tahun
- e. < 2 Tahun

B. Daftar Pertanyaan

Mohon Bapak/Ibu/Sdr/I memberikan tanda *check list* (\surd) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu/Sdr/I.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

1. Penerapan *Good Governance*

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
2.	Adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
3.	Kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
4.	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan dari transparansi pemerintah.					
5.	Penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai daya tanggap (<i>responsive</i>) akan menciptakan tata pemerintahan yang baik.					
6.	Pemerintah daerah tidak akan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.					
7.	Tidak adanya keterbukaan pemerintah akan menciptakan tata pemerintahan yang baik.					
8.	Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.					
9.	Pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif tidak akan menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
10.	Diterapkannya tata pemerintahan yang baik akan meningkatkan efisien dan efektivitas.					
11.	Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
12.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak harus memiliki visi yang jauh kedepan.					
13.	Kegiatan operasional yang efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya.					

2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai dengan tingkat pendidikannya.					
2.	Pegawai selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.					
3.	Pegawai dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaannya.					
4.	Pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik atau tinggi diberikan penghargaan.					
5.	Pegawai bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan.					
6.	Pegawai cepat dan tanggap dalam menjelaskan setiap keluhan publik/masyarakat.					
7.	Pegawai memiliki tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.					
8.	Pegawai memiliki tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan.					
9.	Pegawai ikut serta dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.					
10.	Pegawai dituntut lebih kreatif dan inovatif.					

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	APBD disusun dengan pendekatan kinerja.					
2.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.					
3.	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.					
4.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

5.	Tindakan yang mengakibatkan atas beban APBD tidak akan dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.					
6.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan.					
7.	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.					
8.	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.					
9.	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah.					
10.	Dilakukannya <i>value for money audit</i> terhadap laporan keuangan daerah.					

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pemerintah daerah memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
2.	Pemerintah daerah memiliki komitmen terhadap kompetensi.					
3.	Mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi					
4.	Dalam instansi terdapat stuktur organisasi yang jelas.					
5.	Memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit.					
6.	Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam organisasi.					
7.	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian.					
8.	Adanya penilaian terhadap risiko.					
9.	Adanya penetapan metode pengukuran.					
10.	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko.					
11.	Adanya penetapan pengendalian internal.					
12.	Terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir,					

	menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.					
13.	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
14.	Sistem informasi telah berfungsi dengan baik.					
15.	Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.					
16.	Pemisahan kewajiban telah diterapkan secara memadai.					
17.	Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.					
18.	Adanya dokumen yang memadai terhadap setiap transaksi dan aktivitas.					
19.	Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.					
20.	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.					
21.	Pemantauan dilaksanakan secara periodik.					
22.	Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.					